



Kuota Khusus Siswa Miskin

Ratusan Casis Tak Kebagian

JOGJA -- Lebih dari 200 orang Calon Siswa (Casis) dari keluarga miskin pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), bakal tidak kebagian kuota khusus bagi siswa miskin di 16 SMP negeri di Jogja. Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Dinas Pendidikan, beberapa waktu lalu, yang menyebutkan kuota mencukupi untuk semua calon siswa pemegang KMS.

Seperti diketahui, dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini,

Pemkot menyediakan kursi khusus bagi siswa miskin di SMP, SMA, dan SMK negeri. Kuota khusus siswa miskin di SMP 25 persen dari daya tampung, SMA 10 persen, dan SMK 20 persen.

Kuota diberikan kepada siswa miskin untuk menjamin mereka tidak perlu membayar sekolah. Mengingat jika bersekolah di sekolah swasta, ada kemungkinan mereka masih harus membayar, meskipun Pemkot menyediakan biaya pendidikan bagi siswa miskin melalui

Jaminan Pendidikan Daerah (JPD).

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori di Ruang Pertemuan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sabtu (20/6), mengatakan, kuota bagi siswa miskin di SMP negeri sebanyak 783 kursi.

"Tetapi dari hasil pendataan sementara diketahui lulusan SD yang berasal dari keluarga miskin pemegang KMS sebanyak 1.015 orang. Sehingga yang nggak diterima ada sekitar duaratusan," ujarnya.

Mengenai kemungkinan memperbesar kuota bagi siswa miskin di SMP negeri, Budi berpendapat kuota yang disediakan sudah cukup. Apalagi besaran kuota khusus siswa pemegang KMS itu sudah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwal). Selain itu, kuota tahun ini sudah lebih banyak ketimbang tahun lalu yang hanya 15 persen.

Sedangkan kuota khusus siswa miskin di SMA dan SMK negeri, kata dia, relatif sudah bisa menampung semua calon siswa baru yang berasal dari keluarga pemegang KMS. Jumlah kuota sebanyak 969 kursi, terdiri dari 255 kursi SMA dan 712 kursi SMK.

>> KE HAL 10

Ratusan Casis Tak Kebagian

Sambungan dari halaman 1

"Jumlah itu hampir sama dengan pemegang KMS yang lulus SMP. Kalau pilihannya benar, semua pasti bisa diterima di SMA atau SMK negeri. Kalau pun ada yang harus ke sekolah swasta, paling hanya 5-10 anak," tuturnya.

Selain keterbatasan kuota, kesalahan menentukan pilihan sekolah juga bisa menjadi penyebab siswa miskin tidak bisa masuk sekolah negeri.

Jika siswa miskin menumpuk di sekolah tertentu hingga melebihi kuota di sekolah tersebut, bakal ada yang terlempar ke sekolah swasta akibat salah pilih.

Untuk itu, Dinas Pendidikan menyediakan Posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta, dengan nomor telepon 563030. Posko melayani permintaan informasi berkaitan dengan PPDB. Termasuk informasi sebaran nilai sebagai panduan menentukan pilihan sekolah.

"Tidak bisa kalau siswa pemegang KMS ini langsung diperingkat, terus ditentukan kamu masuk mana, kamu masuk mana. Itu menyalahi kaidah PPDB yang harus transparan dan akuntabel. Sehingga kita cuma bisa memberikan saran-saran, tapi pilihan sepenuhnya di tangan masyarakat," tegasnya. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. JPD			

Yogyakarta, 17 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005